

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

# Layanan RSUD Banyak Dikeluhkan

**Alasan aturan administrasi mengakibatkan pasien harus terbaring lama dan tidak mendapatkan pertolongan meski dalam kondisi parah.**

JAKARTA - Layanan rumah sakit umum daerah (RSUD) Jakarta banyak dikeluhkan. Bahkan sekarang menggunakan ambulans harus membayar. "Mestinya menggunakan ambulans gratis," ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi siap mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar bisa memberi tambahan anggaran guna meningkatkan layanan kesehatan bagi warga.

"Saya siap mendukung bila RSUD membutuhkan anggaran tambahan untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi seluruh warga Jakarta," kata

Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Prasetyo mengatakan dukungan tersebut disampaikan lantaran hingga kini pelayanan RSUD banyak dikeluhkan masyarakat seperti pengurusan surat kematian dan lambannya penanganan pasien kecelakaan.

Ia pun mendesak Pemprov Jakarta untuk mempermudah penanganan pasien RSUD sebagai peningkatan layanan. "Harus menerima orang dalam kondisi apa pun. Iangan bilang nggak bisa terima. Itu tugas rumah sakit," tegasnya.

Prasetyo menyalahkan banyaknya keluhan masyarakat atas layanan RSUD yang terkesan kurang mengutamakan keselamatan nyawa pasien. Terlebih, dengan alasan aturan administrasi yang mengakibatkan pasien harus terbaring lama dan tidak mendapatkan pertolongan meski dalam kondisi tersebut.

Di sisi lain, Komisi D DPRD DKI juga mendesak Pemprov untuk menyediakan ambulans jenazah bagi warga kurang mampu secara gratis sebagai peningkatan layanan kepada

masyarakat. "Untuk beli kain kafan saja kadang tidak mampu, sekarang ambulans ada retribusinya pula, yang ada harapannya, kita gratiskan," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah.

« "Prasetyo menyalahkan banyaknya keluhan masyarakat atas layanan RSUD yang terkesan kurang mengutamakan keselamatan nyawa pasien." »

Ida menjelaskan, pihaknya menemukan di lapangan jika warga ingin meminjam mobil ambulans akan dikenakan retribusi sebesar 350 ribu. Merespons hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyatakan siap untuk meningkatkan pelayanan di seluruh RSUD.

Dari total 31 RSUD di Jakarta, ungkap Ani, pada tahun 2025 akan memprioritaskan pelaya-

nyan Kanker, Jantung, Stroke, dan Uronefrologi (KJSU), serta penyediaan alat kesehatan. "Ini layanan-layanan yang sampai dengan saat ini angka kematiannya paling tinggi dan kemudian jenis-jenis layanan yang butuh respons secara cepat. Itu yang lebih dahulu kita sediakan fasilitasnya," ujar Ani.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah sakit yang ada di Jakarta sebanyak 194 lokasi hingga 2021.

## Layanan Kesehatan

Sementara itu, Polres Metro Jakarta Utara menyediakan pos pelayanan kesehatan saat pelaksanaan aksi buruh, Rabu. "Kami siapkan di dua lokasi pengaman aksi buruh," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan.

Ia mengatakan pelayanan kesehatan ditujukan kepada buruh atau pekerja yang mungkin kelelahan saat menjalankan aksi. Pelayanan kesehatan akan melibatkan anggota polwan yang bertugas.

"Pokoknya pelayanan yang terbaik diberikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan," jelasnya. Gidion menga-

takan untuk dua lokasi pengamanan, Polres Metro Jakarta Utara juga telah mendirikan pos pengamanan dan tenda pelayanan kesehatan.

Pos tersebut didirikan pada dua titik utama yang menjadi konsentrasi yaitu Simpang Coca-Cola dan Stadion Rawa Badak Koja Jakarta Utara. Menurutnya, di Simpang Coca-Cola itu menjadi pertemuan masa yang akan datang dari Jakarta Timur dan dari Jakarta Utara menuju Jakarta Pusat.

Sementara itu, di Rawa Badak ada kegiatan yang dilakukan oleh rekan-rekan serikat pekerja bersama Dinas Tenaga Kerja Jakarta Utara untuk melakukan seremonial dan perayaan terhadap aksi buruh ini. Gidion menegaskan, untuk pengamanan dan pengawalan aksi buruh ini dilakukan pendekatan secara humanis.

Selain itu tidak diperkenankan anggotanya membawa senjata api apalagi menggunakannya. "Yang paling penting dalam pelaksanaan pengamanan aksi buruh ini tidak ada senjata api. Kita melakukan dengan humanis," tutur Gidion. ■ **wid/Ant/G-1**